

ANALISIS PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI SOSIAL DAN LINGKUNGAN (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012)

Andi Rachmanda, Fuad ¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of corporate governance mechanisms on the policy of social and environmental disclosure. Indicators used to measure corporate governance mechanisms in this study is the proportion of independent board, the structure of the Chief Risk Officer (CRO), managerial ownership, board size, independence of the audit committee, the board of commissioners meeting frequency, as well as the nomination and remuneration committee. While social and environmental disclosure as the dependent variable was measured using amount disclosure items appropriate with the Global Reporting Initiative (GRI) G3.1 index. In addition, this study also added two control variables are firm size firm size and leverage.

This study uses secondary data with entire population of banking companies listed in the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2008-2012. The method used to determine the sample using purposive sampling. The analytical method used is multiple linear regression, regression testing prior to first tested the classical assumptions.

The results of hypothesis testing showed that the proportion of independent board negatively affects the social and environmental disclosure. Other results noted that the structure of the CRO, managerial ownership, as well as the nomination committee and remuneration positive effect on social and environmental disclosure. While the size of the board of directors, audit committee independence, and the frequency of meetings of the board of commissioners did not significantly affect disclosure.

Keywords: corporate governance, sustainability report, social and environmental disclosure, GRI

PENDAHULUAN

Menurut Komite Cadbury (1992) *good corporate governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya, dan *stakeholder* pada umumnya yang berwujud pengaturan kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. Terungkapnya skandal keuangan berskala besar seperti Enron, Worldcom, Tyco, dan Global Crossing telah menyebabkan kajian mengenai *corporate governance* meningkat pesat. Menurut Sumariyati dan Poeradisastra (2005) jika perusahaan yang melaksanakan prinsip atau pedoman *good corporate governance* yaitu transparansi, independensi, kewajaran, akuntabilitas dan pertanggungjawaban secara tepat maka dapat dipastikan perusahaan akan memiliki landasan yang kokoh dalam menjalankan bisnisnya, mitra kerja tidak ragu mengembangkan hubungan bisnis lebih luas, para pemasok memiliki kepercayaan serta yakin akan diperlakukan secara adil sehingga bisa memberikan harga yang terbaik yang berarti menciptakan efisiensi bagi perusahaan.

¹ *Corresponding author*

Sebagai tambahan mekanisme *corporate governance* yang terdapat di perusahaan perbankan terlihat lebih penting daripada sektor industri karena perbankan berperan penting sebagai pengatur utama dalam perekonomian. Bank juga berfungsi sebagai transmisi kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral di mana Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan nasional telah merumuskan cetak biru yang dikenal dengan Arsitek Perbankan Indonesia (API). Di dalam API terdapat enam pilar utama yang merupakan sasaran yang ingin dicapai, salah satunya adalah menciptakan *corporate governance* untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Salah satu perangkat penting yang berkorelasi dengan penerapan *corporate governance* adalah pengungkapan informasi yang efisien dan transparan guna melindungi kepentingan pemilik.

Semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi tersebut diharapkan dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi (*information asymmetry*) antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*) serta mengklarifikasi konflik kepentingan antara pemilik dengan manajemen (Sheila *et.al.*, 2011). Dari berbagai macam pengungkapan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, pengungkapan informasi sosial dan lingkungan (*social and environmental disclosure*) yang akan dipelajari lebih lanjut karena pedoman *corporate governance* menambahkan tanggung jawab manajer ke dalam aspek yang lebih luas. Lebih lanjut penanganan isu lingkungan dan sosial merupakan hal yang penting bagi keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang serta pelaporan informasi lingkungan dan sosial merupakan hal yang penting belakangan ini (Pramanik, 2008).

Lebih jauh lagi konferensi *Global Reporting Initiative* (GRI) pada tahun 2000 telah menawarkan pedoman laporan keuangan, lingkungan, dan sosial yang telah dijadikan pedoman oleh banyak perusahaan. Permasalahan yang sekarang muncul adalah pelaporan lingkungan yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan di negara Indonesia bersifat sukarela (*voluntary*). Perusahaan yang melakukan praktik pengungkapan sosial dan lingkungan ditunjukkan minimal dengan melakukan pengungkapan salah satu tema *voluntary disclosure* yang berisikan lingkungan, kemasyarakatan, tenaga kerja, produk, konsumen atau energi (Hackston dan Milne, 1996). Walaupun pada kenyataannya pengungkapan tersebut masih bersifat sukarela (*voluntary*) dan tidak diungkap sebenarnya atau apa adanya karena perusahaan mempunyai kecenderungan untuk menyimpan dengan sengaja informasi yang sifatnya dapat menurunkan arus kas perusahaan. Ghazali dan Chariri (2007) berpendapat bahwa perusahaan akan mengungkapkan semua informasi yang diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi pasar modal. Hal itu mengakibatkan manajer hanya akan mengungkapkan informasi yang sifatnya baik (*good news*) yang dapat menguntungkan perusahaan. Ionescu (2010) juga menyebutkan bahwa pelaporan sosial dan lingkungan masih bersifat sukarela (*voluntary*) di banyak negara berkembang seperti Malaysia dan Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian kali ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori keagenan (*agency theory*) dan teori *stakeholders*. Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan suatu prinsip model kontraktual antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihak disebut *agent* (manajer) dan pihak yang lain disebut *principal* (pemilik perusahaan). *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan (*decision making*) kepada *agent* yang dapat diartikan pula bahwa *principal* memberikan suatu amanah, tugas, tanggung jawab kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Manajer wajib mempertanggungjawabkan semua usaha dan kinerjanya kepada pemilik perusahaan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam yang akurat, dipercaya, transparan, dan relevan adalah dengan menyusun laporan tahunan (*annual report*) tiap akhir periodenya. Laporan tahun ini digunakan oleh berbagai pihak terkait (*stakeholders*) termasuk manajemen perusahaan sendiri. *Corporate governance* merupakan konsep berlandaskan teori keagenan (*agency theory*) yang diharapkan dapat bertindak sebagai alat untuk meyakinkan para investor bahwa mereka akan menerima timbal balik berupa *return* atas dana yang telah mereka investasikan.

Madura (2009) menjelaskan teori *stakeholder* sebagai suatu perspektif tanggung jawab sosial dari suatu entitas/organisasi dalam memandang lingkungan internal dan eksternal sebagai

suatu keragaman dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan pihak yang menanggung kegiatan bisnis tersebut. Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan (*stakeholders*) ini berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberlangsungan perusahaan dan efek timbal balik yang diberikan perusahaan terhadap pihak-pihak terkait. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja perusahaan, maka manajer harus dapat memberikan suatu bentuk pelaporan yang transparan, akuntabilitas, dan bersifat informatif terhadap pemangku kepentingan sehingga pemangku kepentingan dapat menilai keberlangsungan perusahaan. Di samping itu perusahaan juga harus dapat melakukan analisis *stakeholder* sehingga mampu mengetahui kebijakan dan tindakan yang akan ditempuh oleh perusahaan.

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Sosial dan Lingkungan

Komposisi dewan merupakan hal yang paling penting dalam keefektifan memonitor pengendalian manajemen dan mengurangi biaya agensi (Choe dan Lee, 2003). Berdasarkan teori agensi, komisaris independen menunjukkan keberadaan wakil dari pemegang saham secara independen dan juga mewakili kepentingan investor. Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen. Menurut Fama dan Jensen (1983) keberadaan komisaris independen akan lebih efektif dalam memonitor pihak manajer.

Berkebalikan dengan hal tersebut Yusnita (2010) dan Fatayaningrum (2011) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap *environmental disclosure*. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan memiliki kemungkinan bersifat formalitas hanya untuk memenuhi kebutuhan regulasi saja sehingga keberadaan komisaris independen dalam menjalankan fungsi monitoring tidak menggunakan independensinya dengan baik untuk mengawasi kebijakan direksi.

H1: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan.

Pengaruh Struktur Chief Risk Officer (CRO) terhadap Pengungkapan Sosial dan Lingkungan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Vincent, Gabriel, dan Schmid (2011) menyediakan bukti kuat bahwa perusahaan perbankan di mana *Chief Risk Officer* (CRO) melapor langsung kepada dewan komisaris mendapatkan hasil yang signifikan pada masa krisis kredit, sementara bank-bank di mana CRO melapor kepada *Chief Executive Officer* (CEO) terlebih dahulu mendapatkan hasil signifikan lebih buruk daripada bank yang memiliki CRO melapor langsung kepada dewan komisaris. Keberadaan komite manajemen resiko yang independen dan transparan juga memungkinkan dewan komisaris untuk memahami profil risiko perusahaan dengan lebih mendalam (Bates dan Leclerc, 2009). Sesuai dengan teori keagenan, konflik kepentingan dapat terjadi antara CRO dengan CEO di mana terdapat perspektif pengungkapan informasi yang material mengenai resiko yang pernah dihadapi, sedang dihadapi, dan mungkin akan dihadapi yang kemudian akan disampaikan kepada pemilik perusahaan.

H2: Struktur *Chief Risk Officer* (CRO) berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh komisaris maupun dewan direksi dalam perusahaan. Menurut Eng dan Mak (2003) terdapat hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dengan pengungkapan informasi. Manajer mungkin tidak akan mengungkapkan semua informasi material kepada pihak luar karena mereka dapat menggunakan pengetahuannya tersebut untuk tidak memaparkan keuntungan perusahaan kepada *shareholders* luar dan juga menyembunyikan kejangalan (*fraud*) dan ketidak kompetenan (*incompetence*).

Bagaimanapun juga sesuai dengan teori *stakeholder* yang mendasari bahwa manajer yang memiliki kepemilikan saham yang substansial akan membuat manajer berusaha untuk melaksanakan tugas manajerialnya dengan baik demi kepentingan perusahaan dan demi kepentingannya pribadi. Kepemilikan manajerial dianggap dapat meminimalisasi konflik keagenan antara manajemen dengan pemegang saham karena besar kecilnya saham yang dimiliki oleh pihak manajemen menggambarkan adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Ballesta dan Garcia (2005) serta Norita dan Nahar (2004) bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan tingkat pengungkapan informasi yang dihasilkan.

H3: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan.

Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan

Menurut Bodroastuti (2009) serta Florackis dan Ozkan (2004) semakin besar ukuran atau jumlah dewan direksi dapat memonitor proses pelaporan keuangan dengan lebih efektif dibandingkan ukuran dewan direksi yang sedikit. Kontras dengan hal tersebut, Yoshikawa dan Phan (2003) mengemukakan pendapat bahwa semakin besar dewan maka mengakibatkan pengkoordinasian yang semakin sulit karena dengan jumlah besar akan berpotensi menimbulkan friksi dan konflik dalam pengambilan keputusan bersama. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar ukuran dewan akan menghasilkan ketidak efektifan koordinasi, komunikasi, pembuatan keputusan, dan pengendalian dari CEO. Sebaliknya jika semakin kecil ukuran dewan maka akan menghasilkan partisipasi yang berdampak positif dalam melakukan fungsi monitoring terhadap pengungkapan informasi dan kemampuan dewan dalam membuat keputusan bagi perusahaan (Huther, 1997).

H4: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan.

Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan

Menurut Hiro (1995), pengertian komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Keberadaan komite audit dapat meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum, dan mengawasi proses audit secara keseluruhan (Sam'ani, 2008). Sesuai dengan teori *stakeholder* mengenai pemilik kepentingan, untuk menjamin pengungkapan informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan maka komite audit yang independen diperlukan untuk melaksanakan fungsi audit terhadap pelaporan yang kemudian akan diberikan kepada pemilik perusahaan.

H5: Independensi Komite Audit berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan.

Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan

Frekuensi rapat dewan komisaris merupakan intensitas dewan komisaris dalam melakukan rapat untuk mengevaluasi dan membahas perencanaan perusahaan ke depan berdasarkan informasi laporan perusahaan. Rapat dewan komisaris merupakan salah satu sumber informasi yang nantinya digunakan untuk meningkatkan efektifitas dewan komisaris. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Vafea (1999) ditemukan hubungan positif antara frekuensi rapat dengan kinerja perusahaan. Semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat menghasilkan akses informasi yang semakin merata dalam dewan direksi, sehingga diharapkan dapat berdampak pada keputusannya semakin baik dalam pertanggungjawaban kinerja perusahaan.

H6: Frekuensi Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan.

Pengaruh Komite Nominasi dan Remunerasi terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan

Pedoman Umum GCG (KNKG) tahun 2006 menyatakan bahwa komite nominasi dan remunerasi bertugas membantu dewan komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota dewan komisaris dan direksi serta sistem remunasinya. Adithipyangkul *et.al.* (2009) menyatakan bahwa remunerasi yang diberikan perusahaan akan berpengaruh terhadap kinerja dewan komisaris yang kemudian juga berpengaruh juga terhadap kinerja perusahaan. Kinerja dewan komisaris tersebut diukur dengan besaran kompensasi yang harus diungkap setelah melaksanakan kewajibannya. Keberadaan komite nominasi di antara pemegang saham dapat berpengaruh penting karena komite ini juga berfungsi sebagai alat monitoring terhadap keefektifan kinerja dewan komisaris (Vafea, 1999). Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perusahaan terhadap pemangku kepentingan dan alat untuk memonitoring dewan komisaris, maka kelengkapan pelaporan yang mencakup semua aspek pengungkapan termasuk kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan hal yang esensial dan penting.

H7: Komite Nominasi dan Remunerasi berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Pengungkapan informasi sosial dan lingkungan pada penelitian mengacu pada pedoman *Global Reporting Initiative (GRI)* dengan membagi jumlah item pengungkapan perusahaan dengan total keseluruhan item pengungkapan sesuai dengan GRI (G3.1) sebanyak 81 item. Pengungkapan informasi sosial dan lingkungan dalam perusahaan dikelompokkan menjadi 6 kelompok sesuai dengan kategori pengungkapan informasi yang disusun oleh GRI (*G3.1 Sustainability Reporting Guidelines*) yaitu meliputi kategori *economic*, *environmental*, dan *social (labour practices, human rights, society, dan product responsibility)*. Masing-masing item pada tiap indikator pengungkapan diberi skor 1. Proporsi komisaris independen dalam penelitian ini diukur berdasarkan persentase (%) antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan komisaris. Pengukuran struktur CRO dilakukan dengan menggunakan CRO sebagai variabel *dummy* dengan ketentuan bila CRO melaporkan secara langsung kepada dewan komisaris dan CEO mendapat nilai 1 dan bila hanya bertanggung jawab secara langsung kepada CEO atau dalam level tingkat manajemen ketiga maka mendapat nilai 0 (Vincent, Gabriel, dan Schmid, 2011).

Kepemilikan manajerial dalam penelitian ini diukur dengan variabel *dummy*, dengan nilai 1 jika perusahaan mempunyai kepemilikan manajerial dan 0 jika perusahaan tidak mempunyai kepemilikan manajerial (Herawaty, 2008). Ukuran dewan direksi diukur dengan menghitung persentase jumlah anggota direksi dalam suatu perusahaan dibandingkan dengan jumlah anggota direksi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 (jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan minimal 3 orang). Komite audit diukur berdasarkan jumlah anggota komite audit yang ada di perusahaan dibandingkan dengan jumlah anggota sesuai dengan peraturan Bapepam Ketentuan Peraturan Nomor IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (jumlah komite audit minimal 3 orang).

Frekuensi rapat dewan komisaris diukur berdasarkan persentase kehadiran seluruh dewan komisaris dibandingkan dengan total rapat dewan komisaris yang diselenggarakan tiap tahunnya. Komite nominasi dan remunerasi diukur dengan jumlah anggota komite nominasi dan remunerasi yang terdapat dalam perusahaan dibandingkan dengan jumlah minimal komite menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2007 (jumlah anggota komite nominasi dan remunerasi dalam suatu perusahaan minimal 3 orang). Variabel kontrol pada penelitian menggunakan ukuran perusahaan dan leverage. Ukuran perusahaan dinilai dengan *log of total assets* sedangkan *leverage* diukur dengan membagi total hutang dengan total asset perusahaan.

Penentuan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2008-2012. Metode penentuan sampelnya dengan

menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tanggal pencatatan dari tahun 2008-2012.
2. Perusahaan perbankan yang telah menerbitkan laporan tahunan dari tahun 2008-2012.
3. Perusahaan perbankan terdaftar yang memiliki kelengkapan informasi di *annual report* dan *sustainability report* terkait dengan variabel penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder sebagai data yang diperoleh dari sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian. yaitu *annual report* dan *sustainability report* perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2012 yang termuat dalam *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD), *IDX Statistic* 2008-2012, website www.idx.co.id, dan website masing-masing perusahaan.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari nilai berdasarkan rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2006). Kemudian analisis statistik frekuensi untuk mengukur data tunggal yaitu variabel *dummy* penelitian (CRO dan KMAN). Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda maka dilakukan uji asumsi klasik untuk menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan pada penelitian ini juga untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang diuji mempunyai data yang terdistribusikan secara normal dan bebas dari heterokedistisitas, multikolinieritas, serta autokorelasi.

Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis regresi berganda dengan tujuan untuk mengetahui tingkat ketergantungan variabel dependen (*metric*) dengan salah satu atau lebih variabel independen (*metric* dan *non metric*) berdasarkan nilai variabel yang diketahui (Ghozali, 2006). Hasil dari analisis regresi berganda berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Persamaan regresi dengan linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ENVD = \alpha + \beta DKINDEP + \beta CRO + \beta KMAN + \beta UDDIR + \beta IKA + \beta FRD + \beta PNR + \beta LOG_ASSET + \beta LEV + e$$

Keterangan:

ENVD	: Pengungkapan informasi sosial dan lingkungan
α	: Konstanta
β	: Koefisien regresi dari variabel independen
DKINDEP	: Proporsi dewan komisaris independen
CRO	: Struktur CRO
KMAN	: Kepemilikan manajerial
UDDIR	: Ukuran dewan direksi
IKA	: Independensi komite audit
FRD	: Frekuensi rapat dewan komisaris
PNR	: Komite nominasi dan remunerasi
LOG_ASSET	: Ukuran perusahaan
LEV	: <i>Leverage</i>
e	: <i>Error</i>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Dari total populasi 32 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2012 terdapat 128 sampel yang dapat diteliti karena memiliki data yang lengkap dan utuh, karena penelitian ini menggunakan *cross sectional data* maka data antar tahun tidak memiliki hubungan yang berpengaruh. Sampel penelitian ini dapat dilihat di tabel 1.

Tabel 1
Sampel Penelitian

Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012
Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI	32	32	32	32	32
Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan	9	6	6	6	5
Sampel perusahaan perbankan yang memiliki kelengkapan data sesuai dengan indeks GRI	23	26	26	26	27
Sampel Akhir	128				

Deskripsi Variabel

Variabel penelitian dapat digambarkan secara keseluruhan menggunakan analisis statistik deskriptif yang ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ENVD	128	,1358025	,7530864	,288194444	,0969805361
DKINDEP	128	,40	,80	,5780	,07744
UDDIR	128	1,00	4,00	2,2891	,0432
IKA	128	1,00	2,33	1,3125	,36646
FRD	128	,75	1,00	,9286	,07512
PNR	128	1,00	3,00	1,3880	,46161
LOG_ASSET	128	6,1335006	8,8031967	7,451595147	,7449184641
LEV	128	,0894375	1,2748754	,888497331	,0858768139

Selain itu penelitian ini menggunakan dua variabel *dummy* (CRO dan KMAN) sebagai variabel independen, oleh karena itu dilakukan analisis statistik frekuensi untuk mengukur data tunggal masing-masing variabel yang ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3
Statistik Frekuensi

Variabel	Frekuensi	
	1	0
CRO	26	102
KMAN	55	73

Pembahasan Hasil Penelitian

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk menguji kelayakan model penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolineritas, dan uji autokorelasi. Dari keempat pengujian tersebut model penelitian ini lolos keempat uji tersebut sehingga dapat dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda.

Pengujian hipotesis yang menggunakan analisis regresi berganda menghasilkan nilai $-0,18$ sehingga dapat dikatakan model regresi baik dalam melakukan prediksi.

$$ENVD = \alpha + \beta DKINDEP + \beta CRO + \beta KMAN + \beta UDDIR + \beta IKA + \beta FRD + \beta PNR + \beta LOG_ASSET + \beta LEV + e$$

$$ENVD = -0,281 + (-0,182) + 0,049 + 0,034 + 0,008 + (-0,020) + 0,115 + 0,033 + 0,068 + 0,002$$

$$ENVD = -0,18$$

Pada pengujian simultan (*F-test*) menemukan hasil yang signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa ketujuh variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen penelitian. Dari pengujian

koefisien determinasi menghasilkan kemampuan variabel independen pada model ini menerangkan variabel dependen dengan cukup baik (55,2%). Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat di tabel

Tabel 4
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Nilai Signifikansi ($\alpha = 10\%$)
Proporsi Dewan Komisaris Independen (DKINDEP)	,051*
Struktur CRO (CRO)	,003*
Kepemilikan Manajerial (KMAN)	,006*
Ukuran Dewan Direksi (UDDIR)	,601
Independensi Komite Audit (IKA)	,371
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (FRD)	,181
Komite Nominasi dan Remunerasi (PNR)	,071*

Keterangan : *) Signifikan

Hipotesis 1 (H1) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, hipotesis 1 diterima (signifikan). Dari pengujian variabel dewan komisaris independen menggunakan uji parsial (*t-test*) menemukan nilai beta sebesar -0,182 dengan signifikansi sebesar 0,051 (lebih kecil dari 0,1). Hasil tersebut mendukung penelitian yang dilakukan Yusnita (2010) dan Fatayatiningrum (2011) dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan hanyalah bersifat formalitas untuk memenuhi kebutuhan regulasi saja sehingga keberadaan komisaris independen ini menjalankan fungsi monitoring yang baik dan tidak menggunakan independensinya untuk mengawasi kebijakan direksi. Peran komisaris independen terhadap kualitas dan kelengkapan pengungkapan lebih ditentukan dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki bukan jumlah atau proporsi komisaris independen yang dimiliki perusahaan.

Hipotesis 2 (H2) menjelaskan struktur *Chief Risk Officer* (CRO) berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, hipotesis 2 diterima (signifikan). Dari pengujian variabel struktur CRO menggunakan uji parsial (*t-test*) menemukan nilai beta sebesar 0,049 dengan signifikansi sebesar 0,003 (lebih kecil dari 0,1). Hasil tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Vincent, Gabriel, dan Schmid (2011) bahwa perusahaan perbankan di mana *Chief Risk Officer* (CRO) melapor langsung kepada dewan komisaris mendapatkan hasil yang signifikan daripada bank lain yang CROnya melapor langsung kepada dewan direksi. Ditambah dengan keberadaan komite manajemen resiko yang independen dan transparan juga lebih memungkinkan dewan komisaris untuk memahami profil risiko perusahaan dengan lebih mendalam (Bates dan Leclerc, 2009). Laporan yang secara langsung diterima dewan komisaris dari *Chief Risk Officer* tanpa harus melalui dewan direksi terlebih dahulu mempunyai tingkat transparansi lebih tinggi yang berarti resiko-resiko yang terkait dengan isu lingkungan dan sosial dapat diungkap lebih baik. Hal tersebut juga dibuktikan pada penelitian ini di mana perusahaan perbankan yang memiliki CRO bertanggung jawab langsung menyampaikan laporan terhadap CEO dan dewan komisaris mempunyai persentase pengungkapan informasi lingkungan dan sosial yang tinggi.

Hipotesis 3 (H3) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, hipotesis 3 diterima (signifikan). Variabel kepemilikan manajerial diukur menggunakan variabel *dummy* dengan ketentuan nilai 1 jika ada kepemilikan manajerial dan 0 jika sebaliknya. Dari pengujian variabel kepemilikan manajerial menggunakan uji parsial (*t-test*) menemukan nilai beta sebesar 0,034 dan nilai t sebesar 2,813 dengan signifikansi sebesar 0,006 (lebih kecil dari 0,1). Hasil tersebut mendukung penelitian yang dilakukan Ballesta dan Garcia (2005) bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial akan menyebabkan semakin tingginya kualitas laporan keuangan dan Norita dan Nahar (2004) juga menghasilkan kesimpulan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi yang dihasilkan. Dewan direksi dan dewan komisaris yang memiliki kepemilikan saham substansial akan membuat manajer berusaha untuk melaksanakan tugas manajerialnya dengan baik demi kepentingan perusahaan dan demi

kepentingannya pribadi sehingga pengungkapan informasi yang transparan, lengkap, dan relevan menjadi salah satu pertimbangan direksi dan komisaris dalam pengambilan keputusan.

Hipotesis 4 (H4) menjelaskan ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, hipotesis ditolak (tidak signifikan). Dari pengujian variabel ukuran dewan direksi menggunakan uji parsial (*t-test*) menemukan nilai beta sebesar 0,008 dan nilai *t* sebesar 0,524 dengan signifikansi sebesar 0,601 (lebih besar dari 0,1). Dengan demikian tidak terdapat hubungan signifikan, yang berarti variabel ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Ukuran dewan direksi dengan jumlah yang besar tidak berperan dalam mekanisme pengungkapan melainkan kemampuan direksi untuk melakukan pengawasan terhadap pengungkapan laporan lebih dipengaruhi oleh kemampuan memperoleh dan mengakses informasi.

Hipotesis 5 (H5) menyatakan independensi komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, hipotesis 5 ditolak (tidak signifikan). Dari pengujian variabel independensi komite audit menggunakan uji parsial (*t-test*) menemukan nilai beta sebesar -0,020 nilai *t* sebesar -0,898 dengan signifikansi sebesar 0,371 (lebih besar dari 0,1). Dengan demikian tidak terdapat hubungan signifikan, yang berarti variabel kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit independen melakukan pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan pelaksanaan prinsip akuntansi berterima umum serta mengawasi proses audit secara keseluruhan namun tidak bertanggung jawab terhadap item pengungkapan lingkungan dan sosial perusahaan.

Hipotesis 6 (H6) menjelaskan frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, hipotesis 6 ditolak (tidak signifikan). Dari pengujian variabel frekuensi rapat dewan komisaris menggunakan uji parsial (*t-test*) menemukan nilai beta sebesar 0,115 dan nilai *t* sebesar 1,347 dengan signifikansi sebesar 0,181 (lebih besar dari 0,1). Dengan demikian tidak terdapat hubungan signifikan, yang berarti variabel frekuensi rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan lingkungan dan sosial. Hasil tersebut mendukung penelitian yang dilakukan Waryanto (2010) yang menunjukkan temuan bahwa tidak terdapat hubungan antara jumlah rapat dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan sebagai salah satu pertimbangan direksi dan komisaris dalam pengambilan keputusan. Rapat yang dilakukan dewan komisaris kurang efektif atau hanya untuk memenuhi jumlah minimal kehadiran yang ditentukan dan tidak memberikan kontribusi dalam perundingan rapat.

Hipotesis 7 (H7) menyatakan komite nominasi dan remunerasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, hipotesis 7 diterima (signifikan). Dari pengujian variabel komite nominasi dan remunerasi menggunakan uji parsial (*t-test*) menemukan nilai beta sebesar 0,033 dan nilai *t* sebesar 1,822 dengan signifikansi sebesar 0,071 (lebih kecil dari 0,1). Hasil tersebut mendukung penelitian yang dilakukan Vafea (1999). Penentuan besaran kompensasi dan gaji diungkap sebagai bentuk prestasi dalam melaksanakan kewajibannya dan komite nominasi juga berperan dalam memastikan tersedianya sistem pengelolaan sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perseroan sehingga rencana strategis dapat terlaksana dengan baik. Secara tidak langsung kinerja perusahaan yang dipertanggung jawabkan dalam bentuk pengungkapan laporan yang transparan dan independen dapat dijadikan bahan pertimbangan dewan komisaris dan dewan direksi selanjutnya dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan.

KESIMPULAN

Pengujian hipotesis yang menggunakan analisis regresi berganda menghasilkan nilai -0,18 sehingga dapat dikatakan model regresi baik dalam melakukan prediksi. Pada pengujian simultan (*F-test*) menemukan hasil yang signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa ketujuh variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen penelitian. Dari pengujian koefisien determinasi menghasilkan kemampuan variabel independen pada model ini menerangkan variabel dependen dengan cukup baik (55,2%).

Berdasarkan pengujian dan analisis hipotesis yang telah dirumuskan dapat disimpulkan mekanisme *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan dengan rincian 4 hipotesis diterima dan 3 hipotesis ditolak yaitu proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Kemudian struktur CRO, kepemilikan manajerial, serta komite nominasi dan remunerasi berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Ukuran dewan direksi, independensi komite audit, dan frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Hal ini menandakan bahwa kebijakan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan pada perusahaan dapat dipengaruhi oleh: proporsi dewan komisaris independen yang lebih kecil, struktur CRO yang lebih tinggi, kepemilikan manajerial yang lebih besar, serta komite nominasi dan remunerasi yang lebih besar.

Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan yaitu masih sedikit perusahaan perbankan yang menerbitkan *sustainability report* secara lengkap sehingga menyulitkan penelitian. Kemudian masih sedikit perusahaan perbankan yang pengungkapannya mengacu pada *Global Reporting Initiative* (GRI) sedangkan beberapa perusahaan tidak menampilkan informasi terkait dengan penelitian secara lengkap. Di samping itu terbatasnya lingkup perusahaan perbankan yang dijadikan sampel, tidak semua perusahaan perbankan yang beroperasi di Indonesia terdaftar di BEI.

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang disebutkan maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan di antaranya yaitu pada penelitian selanjutnya diberikan dapat menambah ruang lingkup sampel perusahaan perbankan seperti perbankan syariah dan perbankan asing. Kemudian untuk dapat mengikuti kebutuhan perusahaan dapat menggunakan standar GRI yang terbaru (G4) terkait dengan item-item pengungkapan yang harus dilampirkan dalam *annual report* dan *sustainability report* yang lebih lengkap dan detail.

REFERENSI

- Adithipyangkul, *et. al.* 2009. "Executive Perks: Compensation and Corporate Performance in China", *Springer Science Business Media*, pp. 401-425.
- Aebi, V., Sabato, G., dan Schmid, Markus. 2011. "Risk management, Corporate Governance, and Bank Performance in the Financial Crisis", *Journal of Banking & Finance* vol.36, pp. 3213-3226.
- Bodroastuti, Tri. 2009. *Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Financial Distress (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2003-2007)*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Byard, D. ,Li,Y. dan Weintrop, J. 2006. "Corporate Governance and The Quality of Financial Analysts Information", *Journal of Accounting and Public Policy* vol. 25, pp. 609-625
- Eng, L. L. & Mak, Y. T. 2003. "Corporate Governance and Voluntary Disclosure", *Journal of Accounting and Public Policy* vol. 22, pp. 325-345.
- Fatayatiningrum, Desie. 2011. *Analisis Pengaruh Manajemen Laba dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Corporate Environmental Disclosure*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Forum *Corporate Governance* Indonesia. 2006. *Definition of Good Corporate Governance* (diakses pada 24 Oktober 2013)
- Florackis, C. dan Ozka, A. 2004. *Agency Costs and Corporate Governance Mechanisms: Evidence for UK Firms*.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Cetakan IV*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, Imam dan Chariri, Anis. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP
- Hackston, David dan Markus, J., Milne. 1996. "Some Determinants of Social and Environmental Disclosure in New Zealand Companies". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, vol. 9 no.1, pp.77-100.
- Hiro, Tugiman. 1995. *Akuntansi untuk Badan Usaha Koperasi*. Kanisius:Yogyakarta.
- Huther, J. 1997. "An Empirical Test of The Effect of Board Size on Firm Efficiency". *Economics Letter* 54, pp. 259-264.
- Ionescu, L. 2010. *The Role of Financial Globalization in The Changing Governance Practices*. Economics Management and Financial Markets Vol. 5 No. 2,pp. 279-284
- Komite Nasional Kebijakan *Governance*. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Komite Cadbury. 1992. *The Business Roundtable, Statement On Corporate Governance*. Washington DC.
- Lindrianasari. 2004. "Hubungan Antara Kinerja Lingkungan dan Kualitas Pengungkapan Lingkungan Dengan Kinerja Ekonomi Perusahaan di Indonesia", *JAAI* vol.2 no.11
- Luce, R., Valenti, A., dan Mayfield, C.2010. "The Effects of Firm Performance on Corporate Governance". *Management Research Review* vol.34 no.3.
- Madura, Jeff. 2009. *Introduction to Business: Pengantar Bisnis. Edisi Ke-4*. Salemba Empat: Jakarta.
- Mak, Y.T., dan Li, Y. 2001. "Determinants of Corporate Ownership and Board Structure: Evidence from Singapore", *Journal of Corporate Finance* vol.7, pp. 235-256.
- Mohd, N. , Norita and Nahar Abdullah, Shamsul. 2005. *Voluntary Disclosure and Corporate Governance among Financially Distresses Firms in Malaysia*. Monash University Malaysia.
- Norita, M. N. dan Shamsul Nahar, A. 2004. "Voluntary Disclosure and Corporate Governance Among Financially Distressed Firms in Malaysia", *The Electronic Journal of the Accounting Standards Interest Group of AFAANZ*. vol. 3 no. 1.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
- Pramanik, Alok Kumar. 2007. "Environmental accounting and reporting With special reference to India". *The Cost and Management* vol. 35 no. 6.
- Sam'ani. 2008. *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2004–2007*. Tesis Strata-2. Program Studi Magister Manajemen, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Shamsul Nahar, A. 2004. "Board Composition, CEO Duality and Performance Among Malaysian Listed Companies", *Corporate Governance* Vol. 4 No. 4, pp. 47-61.
- Sheila, N. H., Rashid, H. M. , dan Meera, A. K. 2012. "Impact of Corporate Governance on Social and Environmental Information Disclosure of Malaysian Listed Banks: Panel Data Analysis", *Asian Journal of Finance & Accounting ISSN 1946-052X 2012* vol.4 no.1



- Vafeas, N. 1999. "Board Meeting Frequency and Firm Performance", *Journal of Financial Economics* vol. 53. pp. 113-142.
- Vincent, A, Gabriele S., dan Schmid, M. 2011. "Risk Management, Corporate Governance, and Bank Performance In The Financial Crisis", *Journal of Banking & Finance* 36
- Warsono, Sony. 2009. *Corporate Governance Concept and Model*. Yogyakarta: Center Of Good Corporate Governance.
- Waryanto. 2010. "Pengaruh Karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Diponegoro.
- Yoshikawa, T. , dan Phan, P. H. 2003. "The Performance Implications of Ownership-Driven Governance Reform", *European Management Journal* vol. 21 no. 6, pp. 698-706.
- Yusnita, Theodora. 2010. *Corporate Governance, Environmental Performance dan Environmental Disclosure di Indonesia*. Skripsi Akuntansi Universitas Sebelas Maret.